

# Anggaran Pemprov

## Bocor Rp 156 M

### Gubernur Didesak Melarang Rekening Liar

*BPK telah selesai melakukan audit APBD Provinsi Kalbar tahun 2010. Ratusan kasus mencuat. Pemerintah mengembalikan kerugian tak tuntas diselesaikan. Siapa yang bertanggungjawab?*

#### Rincian Temuan

Jumlah kasus	: 178
Kerugian	: Rp 156.050.046.632,41 dan \$ 11.709.282,89
Bendahara	: Rp 42.204.673 (diangsur Rp 20.204.673) 8 kasus Rp 677.497.862 (diangsur Rp 34.095.525)
Non bendahara	: 4 kasus Rp 16.720.069.960 (diangsur Rp 506.287.000)
Pihak ketiga	: 7 kasus Rp 26.660.042.699,07 (tak diangsur)
Lain-lain	: 68 kasus Rp 94.838.630.310,16 (disetor Rp 683.516.372,75)

Sumber: LHP BPK RI



Tony Kurniadi

PONTIANAK. Sebanyak 178 kasus temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar mengindikasikan kerugian daerah sebesar Rp 156 miliar. Pemprov Kalbar belum menindaklanjuti temuan itu seluruhnya.

"Rekomendasi BPK agar Pemprov segera mengembalikan temuan itu belum seluruhnya disetor ke kas daerah. Kita minta hal itu segera diselesaikan," tegas Tony Kurniadi ST, Ketua Pan-sus DPRD Kalbar membahas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2010 kepada Equator, Kamis (22/9).

Menurut Tony, BPK melaporkan hasil temuan mengenai kerugian daerah

Equator

Jumat, 23 September 2011



## Anggaran Pemprov ..... dari halaman 1

provinsi Kalbar sesuai LHP No 11/HP/XIX.PNK /02/2011 tanggal 25 Februari 2011 terdapat 178 kasus/temuan senilai Rp 156.050.046.632,41 dan \$ 11.709.282,89.

Dijelaskan Tony, kasus yang telah mempurifikasi kekuatan hukum tetap sesuai hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK terdapat satu kasus dengan jumlah kerugian daerah yang penanggungjawabnya bendahara sebesar Rp 42.204.673. Jumlah itu sudah diangsur Rp 20.204.673 sehingga masih tersisa Rp 22 juta.

Selanjutnya, legislator PAN ini menambahkan, kasus yang dalam proses penetapan pembebanannya ada delapan belas kasus yakni, kerugian daerah yang penanggungjawabnya bendahara sebanyak tujuh kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 677.497.862, dan telah diangsur Rp 34.095.525, sehingga masih sisa sebesar Rp 643.402.337.

Kerugian daerah yang penanggung jawabnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) non bendahara terdapat empat kasus dengan nilai kerugian daerah Rp 16.720.069.960, dan telah diangsur Rp 506.287.000. Artinya, masih tersisa Rp 16.213.782.960.

Kerugian daerah yang penanggung jawabnya pihak tiga ada tujuh kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 26.660.042.699,07. Tidak ada angsuran dari pihak ketiga. "Tidak hanya itu, kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi ada 159 kasus," ujar Tony.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalbar juga, ujar Tony, terdapat 68 kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 94.838.630.310,16 dan telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 683.516.372,75, sehingga masih sisa Rp 94.149.113.937,41.

Sedangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi, dijelaskan Tony, ada 91 kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 20.526.783.468,93, dan USD 11.709.282,89 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 2.165.078.770. Sehingga masih sisa Rp 18.361.704.698,93 dan

USD 11.709.282,89.

Karena itu, politisi asal Kabupaten Sambas ini menegaskan, dalam rekomendasi Pansus juga meminta pemerintah provinsi agar segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TP/TGR kepada DPRD Provinsi.

"Sehingga dalam melaksanakan tugasnya majelis pertimbangan TP/TGR dapat membedakan kasus yang memang merupakan tugas majelis Pertimbangan, dan kasus mana yang masih dalam proses tanggung jawab pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran," kata Tony.

Pansus juga meminta kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi majelis pertimbangan TP/TGR dan memerintahkan saudara Sekretaris Daerah untuk melakukan Pengawasan secara intensif kepada SKPD-SKPD yang ada.

Selain itu, Pansus juga meminta gubernur sebagai penanggung jawab utama SKPD harus bersikap tegas kepada pimpinan SKPD yang tidak melaksanakan rekomendasi temuan BPK. Bahkan meminta gubernur memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang melakukan kesalahan berulang-ulang.

"Pansus juga merekomendasikan agar Gubernur memerintahkan para pimpinan SKPD yang mendapat temuan dari BPK, segera menindaklanjuti temuan tersebut untuk penyelesaiannya. Gubernur juga diminta secara tegas melarang pimpinan SKPD membuka rekening-rekening liar apapun alasannya karena dapat menjadi sumber penyimpangan," tegas Tony.

Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah provinsi melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kerugian daerah/negara dengan mengintensifkan pembinaan dan pengendalian terhadap aparat pemerintah. Serta dapat memaksimalkan fungsi Inspektorat dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan memberikan dukungan pendanaan yang memadai sehingga Inspektorat dapat

bekerja lebih optimal. Selanjutnya, Pansus juga meminta agar semua pemasukan yang bersumber dari kerugian keuangan daerah disetor tunai ke kas daerah.

Tidak hanya itu, adanya pendapatan retribusi perizinan tertentu berupa Retribusi Izin penggunaan peruntukan tanah dengan kode rekening 1.20.03.00.00.4.1.2.3.01 yang terealisasi sebesar Rp 8.621.135.000,00 atau meningkat 2.155,28 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Pansus meminta kepada inspektorat untuk menelusuri keabsahan penerimaan tersebut untuk kemudian segera diklarifikasi ke BPK.

Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah provinsi hendaknya dapat bersikap tegas kepada para kontraktor yang melaksanakan pekerjaan/proyek yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dan atau melakukan pelanggaran ketentuan yang ada.

Dalam laporannya Pansus juga menyoroti soal aset yang memengaruhi hasil penilaian BPK RI Perwakilan Kalbar. Pemerintah provinsi diminta segera melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset sesuai dengan rekomendasi dan audit BPK.

"Apabila dalam pelaksanaannya masih didapat persoalan-persoalan yang nantinya berdampak pemerintah provinsi sulit untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa pengecualian (WTP).

Maka DPRD untuk dapat membentuk Pansus Aset sebagai sebuah komitmen bersama agar aset terdata dan tertata dengan baik secara keseluruhan," tuntas Tony.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christandy Sanjaya mengatakan, pemerintah provinsi akan segera melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap aset sesuai dengan rekomendasi dan audit BPK. Kemudian,

Tim Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Pemprov Kalbar juga akan bekerja terus-menerus sepanjang tahun guna menindaklanjuti laporan hasil temuan pemeriksaan BPK RI. (jul)